

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketertarikan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS+ merupakan hasil dari pengamatan dan kalkulasi politik dalam dinamika hubungan *principal-agent*, khususnya dalam empat risiko utama: *moral hazard*, *asymmetric information*, *agency slack*, dan *agency cost*. Indonesia menyadari bahwa keempat risiko tersebut melekat dalam struktur kerja sama BRICS+ yang belum sepenuhnya terlembaga dan masih didominasi oleh aktor-aktor besar.

Dalam konteks *moral hazard*, Indonesia menyadari adanya potensi perbedaan pandangan di antara anggota BRICS+ yang dapat berujung pada penyimpangan mandat kolektif, sehingga merugikan seluruh pihak yang terlibat sebagai *principal*. Meski demikian, Indonesia tetap memilih untuk bergabung karena memandang bahwa keterlibatan langsung merupakan cara strategis untuk menjaga kepentingan nasional sekaligus menekan potensi dominasi agenda oleh aktor tertentu.

Terkait *asymmetric information*, ketidaadaan mekanisme pertukaran informasi yang terstruktur di BRICS+ menjadi tantangan dalam memahami arah kebijakan kolektif. Namun, keterbukaan dan transparansi yang sejak awal ditunjukkan oleh Indonesia mendapatkan respons positif dari negara-negara anggota lainnya, sehingga memperkuat kepercayaan dan membuka jalur komunikasi yang lebih luas. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat bagi Indonesia untuk tetap aktif dalam forum tersebut.

Pada aspek *agency slack*, Indonesia mengidentifikasi lemahnya kesinambungan agenda dan absennya struktur kelembagaan permanen sebagai potensi hambatan dalam menjaga efektivitas kerja sama. Namun, fleksibilitas forum justru dipandang sebagai peluang untuk mendorong reformasi kelembagaan dari dalam. Keterlibatan aktif

Indonesia diarahkan untuk memperkuat struktur BRICS+ agar lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Sementara itu, dari sisi *agency cost*, Indonesia tidak menghadapi beban finansial langsung maupun tekanan harmonisasi kebijakan nasional yang bersifat mengikat. Karakter forum yang sukarela dan tidak mengikat secara hukum menjadikan keanggotaan BRICS+ relatif ringan dan tetap memberikan ruang bagi Indonesia untuk menjaga otonomi kebijakan domestik.

Berdasarkan keempat aspek tersebut, Indonesia memandang bahwa potensi risiko dalam keanggotaan BRICS+ masih minim, dapat dikendalikan, dan tidak menghalangi keterlibatan aktif di dalamnya. Keputusan ini juga sejalan dengan reinterpretasi prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, yang kini dimaknai secara lebih oportunistik. Tidak hanya menjaga netralitas, tetapi juga mendorong keterlibatan dalam berbagai forum global demi memperkuat kepentingan nasional.

Sebagai negara yang juga berpartisipasi dalam G20, APEC, ASEAN, dan PBB, langkah Indonesia untuk bergabung dengan BRICS+ mencerminkan konsistensi pendekatan multilateral yang terbuka dan strategis. BRICS+ dipandang sebagai platform potensial untuk memperkuat solidaritas negara-negara Global South dalam menghadapi tantangan struktural dalam sistem ekonomi global, seperti proteksionisme, kesenjangan pembiayaan pembangunan, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya global.

Melalui BRICS+, Indonesia berharap dapat mengakses proyek pembangunan berkelanjutan, memperkuat pertukaran teknologi dan inovasi, menyusun kerja sama perdagangan jangka panjang, memperluas jaringan diplomatik dan ekonomi, serta membuka akses pasar baru baik secara bilateral maupun regional. Harapan-harapan ini mempertegas bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS+ bukan sekadar simbolik, melainkan diarahkan untuk memperoleh manfaat konkret dan strategis bagi pembangunan nasional dan posisi global Indonesia.

Dengan demikian, keputusan Indonesia untuk bergabung dalam BRICS+ mencerminkan kesadaran terhadap dinamika risiko yang melekat dalam hubungan

principal-agent, sekaligus menunjukkan bahwa keterlibatan aktif Indonesia dalam BRICS+ dinilai lebih strategis daripada menghindari risiko yang tidak dapat dihindari sepenuhnya, merefleksikan reinterpretasi prinsip politik bebas aktif yang lebih oportunistik.

4.2. Saran

Penelitian ini telah berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai ketertarikan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS+ melalui pendekatan *principal-agent*. Namun, tentu saja penelitian ini belum sepenuhnya sempurna. Masih banyak aspek lain yang relevan untuk dikaji lebih lanjut, baik terkait hubungan Indonesia dengan BRICS+ maupun dinamika internal forum tersebut. Mengingat Indonesia baru saja bergabung, perjalanan keanggotaannya masih panjang dan diperkirakan akan menghadirkan beragam dinamika penting. Oleh karena itu, studi lanjutan sangat dianjurkan untuk mengamati perkembangan tersebut secara jangka menengah maupun jangka panjang, guna memahami secara lebih mendalam kontribusi dan posisi Indonesia dalam BRICS+ di masa depan.

Di luar cakupan analisis yang dibatasi oleh teori *principal-agent*, sejumlah temuan dalam penelitian ini tetap memiliki relevansi praktis dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam mengelola keanggotaannya di BRICS+. Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis untuk mengonsolidasikan posisi nasional sejak tahap perumusan kebijakan guna menekan risiko *moral hazard*.
2. Menjaga transparansi kebijakan domestik dan komunikasi terbuka guna memperkuat kerja sama, meningkatkan kepercayaan antar anggota, serta menghindari ketimpangan informasi.
3. Mendorong pembentukan struktur kelembagaan permanen seperti sekretariat BRICS+ guna menjamin kesinambungan agenda dan mencegah *agency slack*.

4. Melakukan pemantauan terhadap potensi pembentukan skema pembiayaan kolektif di masa depan agar Indonesia dapat menilai secara tepat implikasi fiskal dan regulatif dari keanggotaan tersebut.

Selain itu, strategi-strategi tersebut juga dapat dijadikan fokus dalam penelitian lanjutan, khususnya untuk mengkaji bagaimana Indonesia merespons dinamika internal BRICS+ setelah resmi bergabung. Penelitian mendatang dapat diarahkan untuk mengevaluasi pelaksanaan strategi diplomasi, efektivitas koordinasi antarinstansi, serta keterlibatan Indonesia dalam pembentukan agenda forum. Dengan demikian, arah kebijakan Indonesia dalam BRICS+ tidak hanya dipahami dari sisi motivasi awal, tetapi juga dari proses implementasi dan hasil keterlibatannya secara konkret di masa depan.

